

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan *flexing* aparatur sipil negara dalam penggunaan media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk memahami dan menganalisis implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku *flexing* ASN di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *flexing* atau pamer kekayaan yang dilakukan oleh ASN memberikan dampak yang serius terhadap integritas ASN yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku *flexing* ASN di media sosial saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta prosedur yang tidak selalu konsisten. Pada penelitian ini penulis mengimplikasikan yaitu DPR dan Pemerintah untuk menyusun undang-undang khusus yang mengatur perilaku ASN di media sosial, termasuk larangan *flexing* dan agar Pengawasan dan penegakan disiplin menjadi kuat memerlukan upaya yang terkoordinasi antara berbagai pihak. Melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan ketat, sistem pelaporan yang transparan, serta penegakan disiplin yang tegas, diharapkan perilaku pamer kekayaan di kalangan ASN dapat diminimalkan.

Kata Kunci: *Flexing*, Aparatur Sipil Negara, Media Sosial

ABSTRACT

This research aims to understand and analyze the *flexing* regulations of state civil servants in the use of social media based on statutory provisions and to understand and analyze the implementation and supervision of disciplinary enforcement of ASN *flexing* behavior on social media based on statutory regulations. This research is a normative descriptive research with the approach used is a statutory approach. The results of this research show that *flexing* or showing off wealth carried out by ASN has a serious impact on the integrity of ASN which results in a decline in public trust in government institutions. Implementation and supervision of disciplinary enforcement of behavior *flexing* ASN on social media currently still faces various challenges, such as limited resources, lack of coordination between institutions, and procedures that are not always consistent. In this research the author implies that the DPR and the Government must draft a special law regulating ASN behavior on social media, including prohibitions *flexing* and for supervision and enforcement of discipline to be strong requires coordinated efforts between various parties. Through education, outreach, strict supervision, a transparent reporting system, and strict enforcement of discipline, it is hoped that the behavior of showing off wealth among ASN can be minimized.

Keywords: *Flexing*, State Civil Apparatus, Social Media